



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2026

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2025**

KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun kelima dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021–2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang akan dicapai.

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan serta meningkatkan kualitas kehidupan penduduk diperlukan suatu perencanaan yang baik, khususnya kebijakan dalam bidang administrasi kependudukan yang tertuang dalam Rencana Kerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.

Pengembangan strategi dan implementasinya merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi, karena dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja mengandung tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan serta sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sehubungan dengan hal itu, kami panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwasannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang mencerminkan dan menjabarkan kegiatan secara umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026 masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan petunjuk dan masukan yang konstruktif dari unit kerja terkait untuk dijadikan bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026 ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya dan khususnya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 22 Juli 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara



Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda I/IVc
NIP.19681210 198803 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.....	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD	6
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan RKPD.....	11
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	15
2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD.....	22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	23
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	28
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	28
3.2. Tujuan dan Sasaran RKPD.....	29
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	30
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	30
BAB V. PENUTUP.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana kerja (renja) perangkat daerah memuat program, kegiatan, Lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonis dengan Bappeda dan Pemangku Kepentingan. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan Akhir;
- c. Penyusunan Rancangan;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah;
- e. Penetapan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara memuat rancangan program dan kegiatan prioritas Pembangunan daerah khususnya bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan kerja dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan amanat tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2025 menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026. Renja ini merupakan dokumen rencana Pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun

guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) yang disusun menjabarkan visi dan misi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan Pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan Pembangunan nasional, propinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu penyusunan RKPD Tahun 2026 harus selaras dengan dokumen perencanaan baik di Tingkat pusat, dokumen perencanaan di Tingkat propinsi dan tidak terlepas memperhatikan pula dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga akan terjadi sinergitas perencanaan Pembangunan Nasional, Propinsi, dan Kabupaten.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- r. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- s. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- u. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- v. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2021-2026 Kabupaten Kutai Kartanegara;
- w. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- x. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 57 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;

1.3. Maksud dan tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2026 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2024 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2025.

Sedangkan tujuan disusunnya Rancangan Akhir RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 ini

adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 menyesuaikan dengan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA PD
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran RKPD

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pelaksanaan Program/Kegiatan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dilaksanakan melalui Program/Kegiatan yang ke dalam Program/Kegiatan Non Urusan dan Program/Kegiatan Urusan Wajib. Sehubungan dengan adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Kepmendagri No.050-3708 Tahun 2020).

Secara umum rata-rata capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 mencapai **83,86%** dan realisasi keuangan **Rp. 17.785.325.873** dari pagu anggaran **Rp. 21.207.163.978**.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 (lima) Program. Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai target 84 (A) dan realisasinya 73,91 (BB) atau capaian kinerja sebesar 87,98%. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu rekomendasinya adalah :

1. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Belum Didukung Pedoman atau SOP;
2. Pengumpulan Data Kinerja atas Rencana Aksi Telah Dilakukan Tetapi Belum Memuat Realisasinya Secara Berkala (Bulanan/Triwulanan/Semester);
3. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment;
4. Pemantauan dan evaluasi rencana aksi belum memberikan alternatif perbaikan dan rekomendasi yang di tindak lanjuti dalam bentuk langkah- langkah nyata sehingga tidak ada menunjukkan perbaikan setiap periode.

Rata-rata capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang termasuk dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 100% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target kinerja 4 laporan, dengan realisasi 4 laporan (100,00%)
Penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ada 4 laporan yaitu: Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja bulanan/semesteran/tahunan.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, target kinerja 2 Laporan, dengan realisasi 2 Laporan (100,00%)
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, target kinerja 1 dokumen, dengan realisasi 1 dokumen (100,00%)
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, target kinerja 100 ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis, dengan realisasi kinerja 100 ASN (100,00%) dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, target kinerja 15 ASN, dengan realisasi 15 ASN (100,00%)
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, target kinerja 6 layanan, dengan realisasi 6 layanan (100,00%)
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, target kinerja 3 paket, dengan realisasi 3 paket (100,00%)
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, target kinerja 1 paket, realisasi kinerja 1 paket (100,00%)
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, target kinerja 3 paket, dengan realisasi 3 paket (100,00%)
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, target kinerja 10.800 dokumen, dengan realisasi 10.800 dokumen (100%)
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, target kinerja 160 laporan, dengan realisasi kinerja 160 laporan (100%)
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, target kinerja 75.000 dokumen, dengan realisasi 75.000 dokumen (100%)
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, target kinerja 120 unit, dengan realisasi kinerja 120 unit (100,00%)
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target kinerja 12 bulan, dengan realisasi 12 bulan (100%)

- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target kinerja 9 unit, dengan realisasi kinerja 9 unit (100%)

B. Program Pendaftaran Penduduk:

Indikator kinerja Program Pendaftaran Penduduk Tahun 2024 yaitu:

1. Persentase Kepemilikan KTP-el dengan target sebesar 99% dan realisasinya 99,28% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.
2. Persentase Kepemilikan KIA dengan target sebesar 90% dan realisasinya 68,39% atau capaian kinerja sebesar 69,08%. Target kinerja tidak tercapai maksimal, kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :
 - a. Kurangnya sumber daya manusia operator SIAK khususnya operator pencetakan KIA;
 - b. Kurangnya regulasi yang mengatur pentingnya kepemilikan KIA terkhusus pada saat penerimaan siswa baru;
 - c. Perlunya meningkatkan inovasi-inovasi dalam peningkatan pencapaian target KIA.

C. Program Pencatatan Sipil

Indikator kinerja Program Pencatatan Sipil Tahun 2024 yaitu :

1. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun dengan target sebesar 99% dan realisasinya 99,68% atau capaian kinerja sebesar 100,68%. Target kinerja tercapai.
2. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim dengan target sebesar 95% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 105,26%. Target kinerja tercapai melebihi dari yang ditargetkan. Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu rekomendasinya adalah agar dipertahankan kinerja yang baik tersebut.
3. Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian dengan target sebesar 99% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 101%. Target kinerja tercapai melebihi dari yang ditargetkan. Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu

rekomendasinya adalah agar dipertahankan kinerja yang baik tersebut.

D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator

kinerja Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun 2024, yaitu : Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai dari yang ditargetkan. Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, rekomendasinya adalah agar dipertahankan kinerja baik tersebut.

E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Indikator kinerja Program Pengelolaan Profil Kependudukan Tahun 2024 yaitu Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai. Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu rekomendasinya adalah agar dipertahankan kinerja yang baik tersebut.

Tabel TC.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (RENJA-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian RENSTRA PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target RENJA_P D Tahun 2024	Realisasi RENJA_P D Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)x100	9	10=(5+7)	11=(10/4)
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	90	86	86	93,22	102,3	88	94,35	107,22%
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persen	100	99,36	100		99,36	100	99,60	100%
2.12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	88(A)	93,35 (A)	84(A)	73,91 (BB)	87,98	86(A)	74,58 (BB)	86,72%
2.12 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	24	4	4	4	100,00%	10	20	83,33%
2.12 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	3	100,00%
2.12 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24	4	4	4	100,00%	3	20	83,33%
2.12 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	100,00%
2.12 01 2 01 08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	100,00%
2.12 01 2 01 09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	100,00%
2.12 01 2 01 10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	100,00%
2.12 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	Laporan	10	2	2	2	100,00%	2		0,00%

2.12	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	474	100	100	100	100,00%	100	300	63,29%
2.12	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	100,00%
2.12	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	1	1	1	100,00%	1	4	400,00%
2.12	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	100,00%
2.12	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	5	1	1	1	100,00%	1		0,00%
2.12	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	100,00%
2.12	01	2	03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	100,00%
2.12	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	1	1	1	100,00%	1	4	80,00%
2.12	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	20	4	4	4	100,00%	4		0,00%
2.12	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	500	200	100	100	100,00%	100	375	75,00%
2.12	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	75	15	15	15	0,00%	15	45	60,00%
2.12	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	30	6	6	6	100,00%	6		0,00%
2.12	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	3	3	3	100,00%	3	9	60,00%
2.12	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	100,00%	1	3	60,00%
2.12	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15	3	3	3	100,00%	3	6	40,00%
2.12	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	54000	2.125	10800	10800	100,00%	10800	12.925	23,94%
2.12	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	800	160	160	160	100,00%	160	443	55,38%
2.12	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	375000	75.000	75.000	75.000	100,00%	75000	150.097	40,03%
2.12	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	556	95	95	95	100%	95		0,00%
2.12	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	25	6	6	6	100,00%	6	13	52,00%
2.12	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	45	10	10	10	0,00%	10	30	66,67%
2.12	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	468	75	75	75	100,00%	75	250	53,42%
2.12	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	18	4	4	4	125,00%	4	16	88,89%
2.12	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Laporan	60	12	12	12	100%	12		0,00%
2.12	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	24	12	12	100,00%	12	44	73,33%
2.12	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	24	12	12	100,00%	12	44	73,33%
2.12	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	60	24	12	12	100,00%	12	44	73,33%
2.12	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	24	12	12	100,00%	12	44	73,33%

2.12	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	45	9	9	9	100,00%	9		40,00%
2.12	01	2	09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	40	8	8	8	100,00%	8	16	40,00%
2.12	01	2	09	04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	1	1	1	0,00%	1	2	40,00%
2.06	01	06			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2. Persentase Kepemilikan KTP-el	Persen	99	99,14	99	99,14	100,14%	99		0,00%
2.06	01	06				3. Persentase Kepemilikan KIA	Persen	99	48,45	50	48,45	96,90%	90		0,00%
2.12	02	2	01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	Dokumen	1.002.008	98.365	200.002	200.002	100,00%	200.002		0,00%
2.12	02	2	01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	2004	1	1	1	100,00%	1	4	0,20%
2.12	02	2	01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	950.000	98.363	200.000	200.000	100,00%	200.000	498.363	52,46%
2.12	02	2	01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	50004	1	1	1	100,00%	1	4	0,01%
					PROGRAM PENCATATAN SIPIL	4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Persen	99	96,33	97	96,33	99,31%	99		0,00%
						5. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim	Persen	99	91,54	88	91,54	104,02%	95		0,00%
						6. Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	Persen	99	100	100	100	100,00%	99		0,00%
2.12	03	2	01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan	Dokumen	10204	851	1101	1101	100,00%	1101		0,00%
2.12	03	2	01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	5200	850	1100	1100	100,00%	1100	2.350	45,19%
2.12	03	2	01	01	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Dokumen	5004	1	1	1	100,00%	1	4	0,08%
2.12	03	2	02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan pelayanan dokumen akta perkawinan non muslim yang diterbitkan	Laporan	604	1	1	1	100,00%	1		0,00%
2.12	03	2	02	01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan	604	1	1	1	100,00%	1	4	0,66%

						PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	7. Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	Persen	100	100	100	99,16	99,16%	100		0,00%
2.12	04	2	01			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah dokumen PKS dan Penyajian Database Kependudukan	Dokumen	60	12	12	12	100,00%	12		0,00%
2.12	04	2	01	01		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	5	1	1	1	100,00%	1	4	80,00%
2.12	04	2	01	02		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	55	11	11	11	100,00%	11	44	80,00%
2.12	04	2	02			Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dokumen	5	1	1	1	100,00%	1		0,00%
2.12	04	2	02	01		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Dokumen	5	1	1	1	100,00%	1	4	8,89%
2.12	04	2	03			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi	Laporan	204	1	1	1	100,00%	1		0,00%
2.12	04	2	03	05		Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	204	1	1	1	100,00%	1	4	196%
						PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	8. Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen	100	100	100	100	100,00%	100		0,00%
2.12	05	2	01			Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen Data Kependudukan dan P rofil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan	Dokumen	14	2	2	2	28,57%	2		17,78%
2.12	05	2	01	01		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	9	1	1	1	100,00%	1	4	44,44%
2.12	05	2	01	02		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	5	1	1	1	100,00%	1	4	80,00%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan, dengan indikator kinerja pelayanan yang telah disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang dituangkan kedalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dan proyeksi untuk Tahun 2025 dan 2026 kami sajikan dalam bentuk Tabel TC.30 sebagai berikut :

Tabel TC.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Target Nasional
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			82 (Baik)	84 (Baik)	86 (Baik)	88 (Sangat Baik)	90 (Sangat Baik)	93,22 (Sangat Baik)	94,16 (Sangat Baik)	88 (Baik)	90 (Sangat Baik)	
2	Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80 (BB)	82 (A)	84 (A)	86 (A)	88 (A)	84 (A)	73,91 (BB)	88 (A)	88 (A)	
4			Persentase Kepemilikan KTP-el	99%	99%	99%	99%	99%	99%	98,52%	99%	99%	
5			Persentase Kepemilikan KIA	50%	70%	90%	99%	99%	90%	74,48%	99%	99%	
6			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	97%	98%	99%	99%	99%	99%	99,17%	99%	99%	
7			Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim	85%	90%	95%	99%	99%	95%	64,65%	99%	99%	
8			Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	99%	99%	99%	99%	99%	99%	100%	99%	99%	
9			Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10			Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Rata-Rata Persentase Realisasi Capaian Kinerja Pelayanan									98,38%	90,48%	100%	100%	

Untuk pencapaian kinerja pelayanan, yang terdiri indikator tujuan, sasaran dan program dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebesar 88 (Sangat Baik) dan realisasinya 94,16 (Sangat Baik) atau capaian kinerja sebesar 93,45% (Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2025). Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu rekomendasinya adalah :
 - a. Pencapaian hasil pengukuran IKM secara kumulatif adalah 94,16. Hal ini berarti secara umum pelaksanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Permen PAN RB No. 14 tahun 2017 tergolong "Sangat Baik" diatas untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan;
 - b. Walaupun semua unsur terdapat nilai Baik semua namun perlu tetap memperbaiki dan mengevaluasi nilai yang menurun dari tahun sebelumnya sebagaimana disebutkan dibawah ini:
 - Prosedur, Produk, kompetensi petugas Layanan mapupun Perilaku petugas Pelayanan :
Sebenarnya media komunikasi, saran dan masukan sudah disiapkan serta sudah menggunakan media online, namun karena masyarakat kemungkinan tidak bisa membuka akses atau keterbatasan pengetahuan mauun informasi maka hal-hal seperti tersebut kurang menjadi perhatian. Untuk itu dapat diperhatikan dan di perbaiki sebagai salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah penilaian terhadap pelayanan kepada masyarakat, begitupun indikasi sub penilaian yang dirasa kurang lainnya.
2. Target Kinerja Indikator Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebesar 100% dengan

realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%, target kinerja tercapai dari yang 13 ditargetkan, adapun persentase kekurangan dari pemenuhan pelayanan tersebut dikarenakan adanya permohonan warga yang tidak dapat diproses lebih lanjut karena kurangnya dokumen yang di syaratkan.

3. Target Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan nilai 86 (BB) dan realisasinya 73,91 (BB) atau capaian kinerja sebesar 85,94% (Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Tahun 2025). Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja dengan rekomendasi adalah :
 - Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pada Disdukcapil;
 - Pengumpulan Data Kinerja atas Rencana Aksi Telah Dilakukan Tetapi Belum Memuat Realisasinya Secara Berkala (Bulanan/Triwulanan/Semester);
 - Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment;
 - Pemantauan dan evaluasi rencana aksi belum memberikan alternatif perbaikan dan rekomendasi yang di tindak lanjuti dalam bentuk langkah langkah nyata sehingga tidak ada menunjukkan perbaikan setiap periode.
4. Target Kinerja Indikator Persentase Kepemilikan KTP-el Tahun 2025 sebesar 99% dan realisasinya 98,52% (568.333) atau capaian kinerja sebesar **99,48%**. Target kinerja belum tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu masih ada perekaman pemula yang belum dilaksanakan.
5. Target Kinerja Indikator Persentase Kepemilikan KIA Tahun 2025 sebesar 99% dan realisasinya 74,48% (176.982) atau capaian kinerja sebesar **70,50%**. Target kinerja belum tercapai maksimal. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kurangnya sumber daya manusia sehingga tidak maksimal dalam melakukan pelayanan langsung jemput bola terkait pencetakan KIA, rekomendasinya adalah perbanyak pelayanan langsung

jemput bola pencetak KIA diseluruh kecamatan dan desa/kelurahan secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan data agregat penduduk untuk mengetahui lokasi-lokasi mana saja yang capaian kepemilikan KIA nya masih rendah.

6. Target Kinerja Indikator Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun Tahun 2025 sebesar 99% dan realisasinya 99,17% (250.406) atau capaian kinerja sebesar **99,93%**. Target kinerja belum tercapai maksimal. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kurangnya sumber daya manusia sehingga tidak maksimal dalam melakukan pelayanan langsung jemput bola terkait penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18, rekomendasinya adalah perbanyak pelayanan langsung jemput bola penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 diseluruh kecamatan dan desa/kelurahan secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan data agregat penduduk untuk mengetahui lokasi-lokasi mana saja yang capaian kepemilikan akta kelahirannya masih rendah.
7. Target Kinerja Indikator Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim Tahun 2025 sebesar 95% dan realisasinya 64,65% (17.780) atau capaian kinerja sebesar 68,05%. Target kinerja belum tercapai maksimal. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja belum maksimalnya pelayanan langsung jemput bola terkait penerbitan dokumen Akta Perkawinan bagi warga non muslim yang sudah menikah secara agama, rekomendasinya adalah pertahankan kinerja yang sudah baik, dan tingkatkan kinerjanya disetiap kesempatan.
8. Target Kinerja Indikator Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian Tahun 2025 sebesar 99% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%.
9. Target Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2025 Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan sebesar 100% dan realisasinya 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%, hal ini dikarenakan terealisasinya seluruh informasi terkait administrasi kependudukan seperti informasi melalui media brosur, spanduk cetak digital, media social/website, dan inovasi berupa VITAMIN BERTENAGA, LAYANAN ONLINE, BUNGA DESAKU target kinerja tercapai, tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, rekomendasinya adalah pertahankan kinerja yang sudah baik, dan tingkatkan kinerjanya disetiap kesempatan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

Permasalahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertuang dalam RPJMD maupun Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Dalam mencapai Solusi permasalahan yang ada yakni dengan melakukan inovasi-inovasi pelayanan publik dalam rangka memuaskan keinginan masyarakat sehingga masyarakat akan tergerak hati bagi yang belum memiliki dokumen kependudukan maupun pencatatan sipil untuk memperoleh dokumen tersebut.

Dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan terdapat 4 (empat) cakupan:

1. Cakupan Kepemilikan/ Perekaman KTP-el

Besaran jumlah KTP-el yang diterbitkan merupakan penjumlahan dari masyarakat yang telah melakukan perekaman KTP elektronik dengan pembanding jumlah wajib KTP di Kabupaten Kutai Kartanegara, mengalami kenaikan dari target yang ditentukan hal tersebut dikarenakan ketersediaan Blanko KTP elektronik yang didistribusikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta telah terpenuhi untuk dilakukan pencetakan. Meningkatnya permohonan KTP-el tersebut berkaitan dengan semua urusan-urusan yang kaitannya dengan birokrasi baik pemerintahan maupun swasta selalu bersentuhan dengan dokumen kependudukan.

2. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran untuk Anak Usia 0-18 Tahun

Realisasi Tingkat kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Kutai Kartanegara meningkat dikarenakan adanya pendekatan pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh akta kelahiran. Dalam upaya untuk terus meningkatkan agar masyarakat Kutai Kartanegara memiliki dokumen kependudukan Akta Kelahiran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan kerja sama dengan beberapa Rumah Sakit dan Puskesmas yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Cakupan Penerbitan Kartu identitas Anak (KIA)

Penerbitan Kartu identitas Anak (KIA) di dalam Renstra 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara *three in one* yakni bayi baru lahir di rumah sakit langsung memiliki Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan KIA. Adapun pelayanan rutin yang dilaksanakan melalui permohonan online Dimana masyarakat dalam pengurusan akta lahir mendapatkan Akta Kelahiran,

perubahan KK, dan KIA. Dan pelayanan ini juga bisa melalui narahubung Kesehatan yang berada di Rumah Sakit maupun Puskesmas.

4. Cakupan Penerbitan Akta Kematian

Menurunkan pembuatan Akta Kematian atas peristiwa kematian yang dilaporkan oleh masyarakat karena kegunaan Akta kematian berkaitan dengan Hak Waris dan dihapusnya Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Camat dan adanya Kerjasama pembuatan melalui Akta Kematian Online, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan jemput bola dalam pembuatan akta kematian online Dimana masyarakat cukup membuat permohonan melalui jaringan "Daring".

Dari permasalahan yang ada disetiap tahun akan adanya faktor-faktor pendukung guna mencapai target yang diharapkan, dengan memperhatikan kendala-kendala yang dialami masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan.

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah untuk mendorong pelayanan publik yang dekat dengan masyarakat.

1. Kemajuan teknologi menuntun respon kebijakan yang antipatif, adaptif, dan cepat dan lompatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui layanan digital/ daring, pelayanan publik yang cepat dan akurat.
2. Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan menuju Satu Data
3. Penguatan Tata Kelola Kependudukan, dengan peningkatan kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dan percepatan kepemilikan dokumen penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Belum terlaksana secara maksimal pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara melalui daring, masyarakat masih ada yang belum memahami beberapa perubahan kebijakan pelayanan administrasi kependudukan seperti misalnya dihapuskannya

pengantar RT dalam persyaratan permohonan pelayanan sesuai dengan Perpres 96 Tahun 2018 maupun perubahan blanko sebagaimana diatur dalam Permendagri 119 Tahun 2019 yang saat ini tidak lagi menggunakan kertas security printing tetapi dicetak diatas kertas HVS putih 80 gram serta dapat dicetak secara mandiri oleh masyarakat.

2. Rata-rata pelayanan per hari di tenant Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik maupun secara daring adalah sebanyak 800 s/d 1000 permohonan per hari dengan beberapa pelayanan yang tidak bisa dilakukan secara daring yaitu pengambilan KTP-el, pencatatan perkawinan dan pelayanan konsultasi dan pengaduan, maka masyarakat masih datang secara langsung ke Mall Pelayanan Publik.
3. Gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada saat ini dipandang belum representative baik itu dari sisi kapasitas ruangan untuk masyarakat, maupun sarana pendukung lainnya seperti tersedianya ruang khusus konsultasi, ruang pelayanan pengambilan KTP-el yang saat ini dilakukan di area ruang pelayanan perekaman. Ketersediaan ruang parkir yang minim juga turut mempengaruhi kenyamanan masyarakat yang datang berpelayanan.
4. Adanya penyalahgunaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, penyalahgunaan dokumen kependudukan banyak dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai motif seperti menghindari blokir oleh Bank, maupun sebagai motif untuk melakukan kejahatan lainnya.
5. Belum optimalnya sosialisasi administrasi kependudukan khususnya perubahan kebijakan pelayanan kependudukan. Masyarakat banyak yang belum mengetahui dan memahami beberapa perubahan kebijakan pelayanan administrasi kependudukan seperti misalnya dihapuskannya pengantar RT dalam persyaratan permohonan pelayanan sesuai dengan Perpres 96 Tahun 2018 maupun perubahan blanko sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 119 Tahun 2019 yang saat ini tidak lagi menggunakan kertas security printing tetapi dicetak diatas kertas HVS putih 80 gram serta dapat dicetak secara mandiri oleh masyarakat.
6. Terbatasnya jumlah SDM pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berjumlah 63 PNS dan 34 PPPK yang masih memerlukan tambahan personal untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Hambatan:

Adapun hambatan dan kendala pada pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2025 yaitu kurangnya SDM yang memiliki kompetensi, Sarana dan Prasarana yang kurang memadai, Perekaman Biometrik di Rumah Sakit/tidak procedural, Kesadaran perekaman bagi pemula E-KTP, Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) masih rendah berdasarkan target Renstra, Cakupan Aktivasi IKD masih rendah, Tidak maksimalnya Pelayanan pencetakan KTP di Kecamatan, Belum optimalnya bagi masyarakat lansia dalam mengurus Dokumen Akta Perkawinan Non Muslim, Kurang optimalnya pengembangan Sistem pendukung pelayanan, Minimnya hak akses OPD dalam pemanfaatan data kependudukan by name by address (BNBA).

Tentu saja tidak mudah mengatasi berbagai masalah dan harus selalu mensosialisasikan kepada Masyarakat terkait segala jenis pelayanan kependudukan yang sudah bisa di akses melalui offline dan juga online.

Faktor-faktor pendorong kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dukungan logistik KTP-el yang didapat melalui proses hibah dengan Pemerintah Pusat, logistik KIA, peralatan perekaman KTP-el dan KIA yang mencukupi.

2.3.3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional/ Internasional, seperti NSPK, SPM, dan SDGs (suistanable Development Goals)

- a. Terpenuhinya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat.
 - b. Tersedianya sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat membuat rasa nyaman.
 - c. Pola pelayanan jemput bola yang akan menghasilkan inovasi pelayanan.
 - d. Masyarakat merasa puas akan layanan yang diberikan.
 - e. Tertib administrasi kependudukan menuju penduduk yang berkualitas.
- Dalam upaya pencapaian target pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, akan selalu menghadapi berbagai tantangan dalam pencapaian tujuan. Oleh karenanya perlu dirancang suatu strategi dengan memanfaatkan peluang yang ada agar tujuan dapat tercapai dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan:

- a. Pertumbuhan penduduk yang akan terjadi peningkatan cukup tinggi sebagai dampak IKN.
- b. Peningkatan jumlah masyarakat yang berpendidikan.
- c. Pelayanan administrasi kependudukan yang bersifat kewenangan Tunggal.
- d. Dukungan pemerintah kabupaten atas rencana peningkatan pelayanan dasar yang berkualitas dan terjangkau.
- e. Kemajuan teknologi dan informasi dalam menunjang pelayanan "DARING".
- f. Integrasi data kependudukan dengan pelayanan publik lain.

2. Peluang:

- a. Adanya dukungan nasional tentang penerapan KTP-el.
- b. Kerjasama dengan instansi lain.
- c. Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (GISA).
- d. Permohonan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya/ gratis.
- e. Dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bisa dicetak secara mandiri dengan kertas A4 80 gram.

2.3.5. Formulasi Isu-Isu Penting dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2026 yang Direncanakan

Dari analisis perkembangan dan masalah kependudukan dan pencatatan sipil dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan yang mutakhir dewasa ini, maka permasalahan yang masih dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah:

- a. Masalah status kewarganegaraan, Disdukcapil Kukar terus berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Timur. Permasalahan ini muncul dari permohonan dokumen kependudukan oleh masyarakat yang memiliki dokumen keimigrasian tetapi belum terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dalam sistem.
- b. Peningkatan pelayanan di tingkat desa, meskipun sudah ada upaya untuk mendekatkan pelayanan kependudukan ke masyarakat, masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah **pemahaman masyarakat** yang masih kurang tentang prosedur pengurusan dokumen. Selain itu, perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat

- dapat mengurus dokumen kependudukan dengan lebih mudah dan mandiri.
- c. Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 - d. Pelayanan online "DARING" belum familiar di masyarakat tertentu.
 - e. Peningkatan jangkauan pelayanan masyarakat/ jemput bola.

Formulasi isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2026 yakni:

- a. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

- b. Peningkatan Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital.

- c. Data Kependudukan yang Terintegrasi pada semua Lembaga publik.

Untuk menghadapi formulasi isu-isu tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan direncanakan dalam mensukseskan DIGITALISASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN untuk PELAYANAN PUBLIK, maka pada Tahun 2026 diprioritaskan untuk:

- a. Melakukan pencetakan KIA di seluruh Kecamatan.

- b. Penambahan sarana dan prasarana bagi Narahubung Desa/Kelurahan.

- c. Pelatihan petugas pelayanan untuk melayani Masyarakat yang berkebutuhan khusus

- d. Percepatan Layanan Dokumen Kependudukan berbasis Digitalisasi

- e. Percepatan aktivasi IKD dengan semua *stakeholder* terkait

- f. PKS untuk hak akses NIK.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan.

Review terhadap rancangan Akhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai hasil analisis kebutuhan Tahun 2026 dengan memperhatikan kegiatan skala prioritas kegiatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil sesuai table berikut:

Tabel TC.31

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90 (Sangat Baik)	16.629.596.801,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90 (Sangat Baik)	21.986.385.074,00	
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	100%					Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	100%		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88 (A)	15.464.596.801,00	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88 (A)	19.326.385.074,00	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	300.000.000,00	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	500.000.000,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	50.000.000,00	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	50.000.000,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	50.000.000,00	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	200.000.000,00	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	1Laporan	100.000.000,00	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	1Laporan	50.000.000,00	

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akutabel	2 Laporan	11.394.120.305,00	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akutabel	2 Laporan	12.629.806.382,00	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarrong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/Bulan	1046.573.305,00	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarrong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/Bulan	12.282.266.382,00	Penambahan Pagu bagi calon P-3K
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarrong	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Laporan	50.000.000,00	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarrong	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Laporan	50.000.000,00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarrong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1Laporan	297.540.000,00	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarrong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1Laporan	297.540.000,00	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1Dokumen	25.000.000,00	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1Dokumen	75.000.000,00	
7	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarrong	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1Laporan	25.000.000,00	7	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarrong	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1Laporan	75.000.000,00	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	30.000.000,00	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	400.000.000,00	
8	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarrong	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang Disediakan	0 paket	0,00	8	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarrong	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang Disediakan	2 paket	200.000.000,00	
9	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarrong	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	50.000.000,00	9	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarrong	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100.000.000,00	
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarrong	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	50.000.000,00	10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarrong	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	100.000.000,00	Diperikan Penambahan Jumlah Peserta dan Pagu Anggaran BMT EK
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Layanan	2.389.807.600,00	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Layanan	3.586.578.882,00	
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarrong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1000.000.000,00	11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarrong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1611578.882,00	
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarrong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	33.750.000,00	12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarrong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	50.000.000,00	Diperikan Penambahan Jumlah Rician Belanja Makanan dan Minuman
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarrong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	700.000.000,00	13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarrong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	750.000.000,00	Diperikan Penambahan Anggaran Belanja Hibah Uang Ke Pemerintah Pusat untuk Pengadaan Blangko KTP-el sebanyak 50.000 lembar
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tenggarrong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	10.800 Dokumen	25.000.000,00	14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tenggarrong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	10.800 Dokumen	25.000.000,00	
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarrong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	331057.600,00	15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarrong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	850.000.000,00	
16	Penausahaan Anisip Dinamis pada SKPD	Tenggarrong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Anisip Dinamis pada SKPD	65.000 Dokumen	100.000.000,00	16	Penausahaan Anisip Dinamis pada SKPD	Tenggarrong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Anisip Dinamis pada SKPD	75.000 Dokumen	200.000.000,00	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 Unit	620.000.000,00	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 Unit	890.000.000,00	
17	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarrong	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0,00	17	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarrong	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	270.000.000,00	
18	Pengadaan Mebel	Tenggarrong	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	50.000.000,00	18	Pengadaan Mebel	Tenggarrong	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	50.000.000,00	
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarrong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	500.000.000,00	19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarrong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 Unit	600.000.000,00	
20	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarrong, Kota Bangun, Kembang Jangut, Muara Badak dan Muara Jawa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1Unit	70.000.000,00	20	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarrong, Kota Bangun, Kembang Jangut, Muara Badak dan Muara Jawa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1Unit	70.000.000,00	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Laporan	766.255.896,00	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Laporan	1025.000.000,00	
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarrong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00	21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarrong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25.000.000,00	
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarrong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	355.000.000,00	22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarrong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	355.000.000,00	
23	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarrong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000,00	23	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarrong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000,00	Diperikan Penambahan Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Pengerin (AC), Personal Komputer dan Printer
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarrong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	361265.896,00	24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarrong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	570.000.000,00	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	9 Unit	69.430.000,00	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	9 Unit	226.000.000,00	
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarrong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	49.430.000,00	25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarrong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	120.000.000,00	
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarrong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	1Unit	20.000.000,00	26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarrong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	1Unit	100.000.000,00	

II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		2. Persentase Keperluan KTP-el	99%	295.000.000,00	II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		2. Persentase Keperluan KTP-el	99%	750.000.000,00
			3. Persentase Keperluan KIA	90%	300.000.000,00				3. Persentase Keperluan KIA	90%	300.000.000,00
9	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah pelayanan dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	200.002 Dokumen	395.000.000,00	9	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah pelayanan dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	200.002 Dokumen	1050.000.000,00
27	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1Dokumen	30.000.000,00	27	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1Dokumen	350.000.000,00
28	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	200.000 Dokumen	85.000.000,00	28	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	200.000 Dokumen	400.000.000,00
29	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1Laporan	300.000.000,00	29	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1Laporan	300.000.000,00
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		4. Persentase Keperluan Akta Kelahiran Usia 0-38 Tahun	99%	200.000.000,00	III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		4. Persentase Keperluan Akta Kelahiran Usia 0-38 Tahun	99%	250.000.000,00
			5. Persentase Keperluan Akta Perkawinan Non Muslim	95%	120.000.000,00				5. Persentase Keperluan Akta Perkawinan Non Muslim	95%	200.000.000,00
			6. Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	99%	300.000.000,00				6. Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	99%	200.000.000,00
10	Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan	1010 Dokumen	300.000.000,00	10	Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan	1010 Dokumen	450.000.000,00
30	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	100 Dokumen	200.000.000,00	30	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	100 Dokumen	200.000.000,00
31	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1Dokumen	300.000.000,00	31	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1Dokumen	250.000.000,00
11	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Jumlah laporan pelayanan dokumen akta perkawinan non muslim yang diterbitkan	1Laporan	120.000.000,00	11	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Jumlah laporan pelayanan dokumen akta perkawinan non muslim yang diterbitkan	1Laporan	200.000.000,00
32	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1Laporan	10.000.000,00	32	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1Laporan	200.000.000,00
IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		7. Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	100%	250.000.000,00	IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		7. Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	100%	800.000.000,00
			12. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		350.000.000,00				12. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		450.000.000,00
33	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1Dokumen	50.000.000,00	33	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1Dokumen	250.000.000,00
34	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1Dokumen	100.000.000,00	34	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1Dokumen	200.000.000,00
13	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah dokumen Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1Dokumen	50.000.000,00	14	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah dokumen Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1Dokumen	150.000.000,00
35	Facilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1Dokumen	50.000.000,00	35	Facilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1Dokumen	50.000.000,00
14	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi	1Laporan	50.000.000,00	13	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi	1Laporan	200.000.000,00
36	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1Laporan	50.000.000,00	36	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1Laporan	200.000.000,00
V	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		8. Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	100.000.000,00	V	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		8. Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	150.000.000,00
			15. Penyusunan Profil Kependudukan		100.000.000,00				15. Penyusunan Profil Kependudukan		150.000.000,00
37	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1Dokumen	50.000.000,00	37	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1Dokumen	100.000.000,00
38	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	1Dokumen	50.000.000,00	38	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	1Dokumen	50.000.000,00
Jumlah					35.629.596.801,00	Jumlah					21.986.385.074,00

Review terhadap rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 dilakukan untuk membandingkan rancangan Akhir (Renstra) terhadap analisis kebutuhan setelah diadakannya musyawarah antar OPD dengan pemangku kepentingan, dan mengingat kebutuhan sarana dan prasarana yang harus terpenuhi untuk mendukung pelayanan masyarakat. Pada rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2026 anggaran sebesar Rp. 20.129.551.038,00 (Dua Puluh Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah) dan Analisa kebutuhan Rp. 21.595.962.824,00 (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2026 disamping berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dengan menyediakan melalui website: layanan-online-dukcapil.kukarkab.go.id. Melalui website tersebut akan menjadi perhatian dalam rangka perbaikan mutu pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam melaksanakan tugas pokok pelayanan kepada masyarakat tentang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mengakomodir usulan dari masyarakat melalui musrenbang, tetapi melalui Forum PD dengan memperhatikan PD pendukung pelayanan (Kecamatan se-Kutai Kartanegara) dan lintas sektor yang lain.

Tabel 2.5 (TC.32)

Tidak ada usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat dan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Pada hakekatnya adalah upaya Tertib Dokumen Kependudukan atau Tertib Administrasi Kependudukan secara terpadu melalui digitalisasi identitas, tidak hanya sekedar pengawasan terhadap pengadaan blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi hendaknya harus tersistem, konkrit dan pragmatis, artinya mudah difahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum berfungsi melindungi, mengakui/mengesahkan status kependudukan atau peristiwa penting yang dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain dokumen kependudukan memiliki manfaat bagi si pemegang dokumen atau penduduk. Upaya tersebut, merupakan tugas negara atau pemerintah sebagai pelayan publik, dan menjadi urusan wajib. Untuk itu, faktor-faktor strategis yang harus ditata dan disiapkan agar tugas tersebut berfungsi dan efektif, adalah :

- a. Menyiapkan perangkat infrastruktur untuk melakukan monitoring terhadap kondisi perangkat yang ada;
- b. Melakukan peremajaan perangkat yang sudah kadaluwarsa (out of product, out of sale, out of warranty); dan
- c. Memetakan kondisi database Kependudukan untuk persiapan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

2. Dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Program Pencegahan Stunting.

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerjasama dengan BKKBN menyediakan data kependudukan untuk mensukseskan program keluarga Sejahtera dalam upaya menekan angka *stunting* di Indonesia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memastikan setiap anak usia 0-18 tahun mendapatkan dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA);
- b. Data Kependudukan sangat strategis untuk mempermudah berbagai pelayanan publik, tidak hanya vaksinasi dan stunting, kedepan banyak

program prioritas pemerintah yang memerlukan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

3. Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Di Seluruh Indonesia.

- a. Perbaikan terhadap keluhan masyarakat dalam layanan Administrasi Kependudukan;
- b. Pelaksanaan regulasi baru bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

4. Memastikan Pencapaian Target Nasional Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

- a. Mewujudkan target kinerja perekaman KTP-el mencapai 99,4%
- b. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran mencapai 97%;
- c. Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai 60% ditahun 2025;
- d. Menyelenggarakan buku pokok pemakaman 50% desa/kelurahan memiliki buku Pokok Pemakaman dan di dorong 50% Kompleks Pemakaman memiliki BPP;
- e. Melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan di tingkat Kabupaten sebanyak 15 OPD;
- f. Mewujudkan akses data dalam pemanfaatan data kependudukan di tingkat kabupaten sebanyak 15 OPD;
- g. Membuat inovasi tiap semester minimal 1 inovasi, setahun 2 inovasi;
- h. Mewujudkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) mencapai 30% dari total capaian perekaman.

5. Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masih belum mencapai target nasional berkomitmen mengambil langkah-langkah percepatan untuk menyelesaikan target.

3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 tahun kedepan (kapan). Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara menetapkan tujuan yang

ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu, **Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**, dengan Indikator Kinerja Tujuannya adalah ***Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil***.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, Triwulan dan bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara menetapkan sasaran untuk tahun anggaran 2021-2026 adalah ***Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil***, dengan Indikator Kinerja Sasarannya adalah ***Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil***.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sesuai Tujuan *Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara dengan Sasaran *Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, dengan Indikator Kinerja Sasarannya adalah *Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2026 berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun berdasarkan :

- a. Pencapaian Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara;
- b. Berkorelasi dan bersinergi dengan kebijakan nasional;
- c. Peningkatan tugas dan fungsi kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2026 berdasarkan Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemuktahirannya, direncanakan berjumlah 5 (lima) Program dengan 15 (lima belas) Kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) Sub Kegiatan yang dibiayai melalui anggaran APBD, yang sebagian besar merupakan Program Prioritas Bupati terpilih dan Kegiatan koordinasi dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif pada APBD Murni adalah sebesar Rp.20.129.551.038,00 untuk rencana prakiraan maju tahun 2024 kebutuhan dana/pagu indikatifnya adalah sebesar Rp. 21.595.962.824,00 dengan jumlah Program sebanyak 5 (lima) Program dengan 15 (lima belas) Kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) Sub Kegiatan.

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab II, terhadap Program tidak ada perbedaan dengan RPJMD Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dituangkan didalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, terdapat beberapa sub kegiatan yang akan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan atau ketersediaan anggaran serta percepatan pencapaian target kinerja yang akan dicapai, adapun Rencana Kerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2026 untuk lebih jelasnya Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kabupaten Kutai Kartanegara

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

2	12	01	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		1	Dokumen	25.000.000,00	75.000.000,00			1	Dokumen	75.000.000,00
2	12	01	2	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	1	Laporan	25.000.000,00	75.000.000,00	APBD	Facilitasi Hibah Laptop RT	1	Laporan	75.000.000,00
2	12	01	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		4	Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00			4	Dokumen	400.000.000,00
2	12	01	2	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tenggarong	0	Paket	0,00	0,00			1	Paket	200.000.000,00
2	12	01	2	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	100	Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	APBD		100	Orang	100.000.000,00
2	12	01	2	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	0	Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	APBD	Penambahan Jumlah Peserta dan Pagu Anggaran BIM TEK	35	Orang	100.000.000,00
2	12	01	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		6	Layanan	2.389.807.600,00	1.914.807.600,00			6	Layanan	3.586.578.882,00
2	12	01	2	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tenggarong	2	Paket	1000.000.000,00	725.000.000,00	APBD		3	Paket	1611578.882,00
2	12	01	2	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tenggarong	1	Paket	33.750.000,00	33.750.000,00	APBD	Diperlukan Penambahan Jumlah Rincian Belanja Pengadaan Stand Bazar	1	Paket	150.000.000,00
2	12	01	2	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tenggarong	2	Paket	700.000.000,00	700.000.000,00	APBD	Diperlukan Penambahan Anggaran Belanja Hibah Uang Ke Pemerintah Pusat untuk Pengadaan Blangko KTP-el sebanyak 100.000 keping	3	Paket	750.000.000,00
2	12	01	2	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Tenggarong	0	Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	APBD		10800	Dokumen	25.000.000,00
2	12	01	2	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	150	Laporan	331057.600,00	331057.600,00	APBD		150	Laporan	850.000.000,00
2	12	01	2	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	65000	Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	APBD		75000	Dokumen	200.000.000,00
2	12	01	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		95	Unit	620.000.000,00	820.000.000,00			80	Unit	890.000.000,00
2	12	01	2	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tenggarong	2	Unit	0,00	200.000.000,00	APBD	Sewa kendaraan dinas operasional kantor	6	Unit	270.000.000,00
2	12	01	2	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tenggarong	0	Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	APBD		10	Unit	50.000.000,00
2	12	01	2	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tenggarong	15	Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	APBD		60	Unit	500.000.000,00
2	12	01	2	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tenggarong, Kota Bangun, Kembang Janggut, Muara Badak dan Muara Jawa	1	Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	APBD		4	Unit	70.000.000,00
2	12	01	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12	Laporan	766.265.896,00	791.265.896,00			12	Laporan	1.025.000.000,00

2	12	01	2	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	12	Laporan	0,00	25.000.000,00	APBD	Belanja Pengiriman Blangko KTP-el	12	Laporan	25.000.000,00
2	12	01	2	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tenggarong	12	Laporan	355.000.000,00	355.000.000,00	APBD	Belanja sewa bandwidth 350jt	12	Laporan	355.000.000,00
2	12	01	2	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tenggarong	12	Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	APBD	Diperlukan Penambahan Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Pendingin (AC), Personal Komputer dan Printer	12	Laporan	75.000.000,00
2	12	01	2	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tenggarong	12	Laporan	361265.896,00	361265.896,00	APBD	Jasa Tenaga Teknis Multimedia 3 Orang, Penjaga Keamanan 4 Orang	12	Laporan	570.000.000,00
2	12	01	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah		9	Unit	69.410.000,00	69.410.000,00			9	Unit	220.000.000,00
2	12	01	2	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tenggarong	8	Unit	49.410.000,00	49.410.000,00	APBD	Penambahan Belanja Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor	16	Unit	120.000.000,00
2	12	01	2	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Tenggarong	1	Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	APBD		1	Unit	100.000.000,00
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2. Persentase Kepemilikan KTP-el		99	Persen	295.000.000,00	295.000.000,00			99	Persen	750.000.000,00
						3. Persentase Kepemilikan KIA		90	Persen	100.000.000,00	100.000.000,00			99	Persen	300.000.000,00
2	12	02	2		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan dokumen pendaftaran penduduk yang di terbitkan		200.002	Dokumen	395.000.000,00	395.000.000,00			200.002	Dokumen	1.050.000.000,00
2	12	02	2	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	1	Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	APBD		1	Dokumen	350.000.000,00
2	12	02	2	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	150.000	Dokumen	185.000.000,00	185.000.000,00	APBD		200.000	Dokumen	400.000.000,00
2	12	02	2	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	1	Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	APBD		1	Laporan	300.000.000,00
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun		99	Persen	100.000.000,00	100.000.000,00			99	Persen	250.000.000,00
						5. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim		95	Persen	120.000.000,00	120.000.000,00			95	Persen	200.000.000,00
						6. Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian		99	Persen	200.000.000,00	200.000.000,00			99	Persen	200.000.000,00

2	12	03	2		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan		1001	Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00			1301	Dokumen	450.000.000,00
2	12	03	2	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Semua Kecamatan	100	Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	APBD		1300	Dokumen	200.000.000,00
2	12	03	2	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Semua Kecamatan	1	Layanan	100.000.000,00	100.000.000,00	APBD		1	Layanan	250.000.000,00
2	12	03	2		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan pelayanan dokumen akta perkawinan non muslim yang diterbitkan		1	Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00			1	Laporan	200.000.000,00
2	12	03	2	01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Semua Kecamatan	1	Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	APBD		1	Laporan	200.000.000,00
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	7. Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan		100	Persen	250.000.000,00	250.000.000,00			100	Persen	800.000.000,00
2	12	04	2		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah dokumen PKS dan Penyajian Database Kependudukan		12	Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00			12	Dokumen	450.000.000,00
2	12	04	2	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Semua Kecamatan	1	Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	APBD	Penambahan Anggaran untuk pencapaian target nasional peningkatan aktivasi identitas Kependudukan Digital (KD) 25% (127.000 orang) dari Total Perekaman penduduk	1	Dokumen	250.000.000,00
2	12	04	2	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Semua Kecamatan	11	Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	APBD	Penambahan Pagu Anggaran untuk melaksanakan Sosialisasi PKS ke seluruh OPD	11	Dokumen	200.000.000,00
2	12	04	2		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1	Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00			1	Dokumen	150.000.000,00
2	12	04	2	01	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	1	Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	APBD		1	Dokumen	150.000.000,00
2	12	04	2		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi		1	Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00			1	Laporan	200.000.000,00
2	12	04	2	05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	1	Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	APBD		1	Laporan	200.000.000,00
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	8. Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan		100	Persen	100.000.000,00	100.000.000,00			100	Persen	160.000.000,00
2	12	05	2		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen Data Kependudukan dan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan		2	Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00			2	Dokumen	160.000.000,00
2	12	05	2	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	1	Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	APBD	PROGRAM DISAPA	1	Dokumen	100.000.000,00
2	12	05	2	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Semua Kecamatan	1	Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	APBD		1	Dokumen	50.000.000,00
Jumlah										16.629.596.801,00	16.629.596.801,00	Jumlah				21.986.385.074,00

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025, serta merupakan kesinambungan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.1. Catatan Penting

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2026. Yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 Urusan Wajib Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Sedangkan apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dengan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 tidak dilakukan mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal tidak lagi mengakomodir Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penambahan Pagu Sub Kegiatan lebih dikarenakan untuk mendukung Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, yaitu Program DISAPA atau Program Digitalisasi Pelayanan Publik yang merupakan Program Dedikasi Kukar IDAMAN,

yang ditujukan untuk membangun mindset dan culturset tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan didukung oleh seluruh *stakeholders* termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
4. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pokok dan Unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaannya;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan

- tentang RPJMD, Pelaksanaan RPJMD, Pengawasan pelaksanaan RPJMD, serta evaluasi pelaksanaan RPJMD;
6. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;
 7. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dilakukan pada tahun kedua dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara secara sendiri (evaluasi diri) untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka *clean goverment and good governance* (Dunia Usaha, Masyarakat dan Pemerintahan).

4.3. Rencana Tindak Lanjut.

Rencana tindak lanjut Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026 akan dilanjutkan ketahapan penyusunan Rancangan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi dengan BAPPEDA dan Tim Gugus Tugas Kukar Idaman, selanjutnya inputing ke SIPD 2026 menyesuaikan dengan pagu dan target RENSTRA 2026 perangkat daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tenggarong, Juli 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara



Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I/IVb
NIP.19681210 198803 1 004